

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN**

**DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Good Government Governance**

**2.1.1.1 Definisi Good Government Governance**

Menurut Mardiasmo (2018 : 23) yang dikutip oleh World Bank mengungkapkan bahwa Good governance adalah :

“Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.”

Sedangkan menurut Leny Nofianti (2015 : 52) yang dikutip oleh Soepomo (2000 : 143) mengungkapkan bahwa Good governance adalah :

“Pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh seperti memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah.”

Dari beberapa definisi diatas Rizal Djalil (2014 : 395) juga menyatakan bahwa Good government governance diartikan sebagai berikut yaitu :

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Maka dapat penulis simpulkan dari definisi diatas bahwa Good government governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

#### **2.1.1.2 Indikator Good Government Governance**

Menurut Sedarmayanti (2014 : 5) indikator Good Government Governance adalah : Partisipasi (participation), Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Efektivitas (effectiveness), Penegakan Hukum (law enforcement). Berikut ini adalah penjelasan dari Cara pengukuran atau indikator diatas :

1. Partisipasi (participation) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

2. Transparansi (transparency) adalah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.
3. Akuntabilitas (accountability) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.
4. Efektivitas (effectiveness) adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.
5. Penegakan hukum (law enforcement) adalah hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak azasi manusia dan dalam bentuk merugikan Negara.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) yang dikutip oleh United National Development Program (UNDP) terdapat indikator good government governance, sebagai berikut: Participation, Rule Of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, Strategic Vision. Maka penjelasan dari indikator good government governance diatas sebagai berikut:

1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui lembaga perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan pendapatnya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule Of Law. Kerangka hukum yang harus adil dan dilaksanakan tanpa memandang dia siapa dan jabatannya apa.
3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam hal menyampaikan pelayanan *stakeholder*.
5. Consensus Orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan.
9. Strategic Vision. Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan untuk hal yang lebih baik lagi.

Adapun indikator Good Government Governance dalam Mahsun dkk (2018 : 48), yaitu : Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), dan Partisipasi (Participation) Berikut penjelasan dari indikator Good Government Governance adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency) Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.
2. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Partisipasi (Participation) adalah Keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Maka secara tidak langsung good government governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja pada suatu pemerintah daerah.

## 2.1.2 Akuntabilitas Keuangan Daerah

### 2.1.2.1 Definisi Akuntabilitas Keuangan Daerah

Menurut Rizal Djalil (2014 : 450) Akuntabilitas keuangan daerah merupakan sebagai berikut :

“Mempertanggungjawabkan mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2015 : 11) akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut :

“Lembaga-lembaga publik yang akan mempertanggungjawabkan dalam penggunaan dana publik secara ekonomi, efisien dan efektif, sehingga tidak akan ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi yang dilakukan. Anggaran dan keuangan sangat ditekankan didalam akuntabilitas keuangan dan sangat penting karena pengelolaan keuangan selalu menjadi faktor yang menjadi perhatian di dalam masyarakat.”

Selanjutnya ada menurut Mardiasmo (2018 : 27) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan adalah :

“Pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Pemerintah harus bisa menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik”.

Maka dapat penulis simpulkan dari definisi diatas bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kewajiban yang pada dasarnya untuk memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan serta

pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif dan pemerintah juga bisa menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

### **2.1.2.2 Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Menurut Rizal Djalil (2014 : 450) Indikator dari akuntabilitas keuangan adalah : Integritas keuangan, Pengungkapan, Ketaatan. Berikut adalah penjelasan dari indikator akuntabilitas keuangan :

1. Integritas keuangan yaitu Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi.
2. Pengungkapan yaitu Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.
3. Ketaatan yaitu Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Menurut Mardiasmo (2018 : 78) menyatakan bahwa indikator akuntabilitas keuangan daerah yaitu : perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal,

politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian kinerja, motivasi, dan menciptakan ruang publik. Berikut adalah penjelasan dari indikator akuntabilitas keuangan :

1. Perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam merencanakan tindakan yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah.
2. Pengendalian adalah alat untuk memberikan rencana secara detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan suatu saat dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. kebijakan fiskal yaitu untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Politik yaitu memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
5. koordinasi dan komunikasi yaitu harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakannya suatu anggaran pemerintah.
6. penilaian kinerja yaitu dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Motivasi yaitu untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. menciptakan ruang publik yaitu kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.

Sedangkan menurut Mahsun dkk (2018 : 65) menyatakan bahwa indikator akuntabilitas keuangan daerah yaitu : Penganggaran berikut ini adalah penjelasan dari indikator akuntabilitas keuangan :

“Suatu aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas yang dilakukan sehingga berpengaruh kepada akuntabilitas keuangan.”

### **2.1.3 Sistem Pengendalian Manajemen**

#### **2.1.3.1 Definisi Sistem Pengendalian Manajemen**

Menurut Mardiasmo (2018 : 55) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian manajemen yaitu sebagai berikut :

“Suatu kegiatan atau sistem pelaksanaan strategi organisasi secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat segera dicapai.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2015 : 58) Yang dikutip oleh Zahirul Hoque (2002) yaitu sebagai berikut :

“Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu alat untuk memperoleh data dalam membantu mengkoordinasikan proses pembuatan perencanaan dan keputusan pengendalian dalam organisasi.”

Adapun menurut Mulyadi (2011:3) mendefinisikan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah:

“Suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.”

Maka dapat penulis simpulkan dari definisi diatas bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem dalam merencanakan suatu strategi organisasi untuk mencapai tujuan tersebut serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.

### **2.1.3.2 Indikator Sistem Pengendalian Manajemen**

Menurut Mardiasmo (2018 : 61) menyatakan bahwa indikator sistem pengendalian manajemen yaitu : Perumusan Strategi, Perencanaan Strategi, Penganggaran, Operasional, Evaluasi Kinerja. Berikut adalah penjelasan dari indikator diatas :

1. Perumusan Strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan Strategi juga merupakan tugas dan tanggungjawab manajemen atas, Perumusan Strategi ini juga lebih bersifat permanen dan berjangka.
2. Perencanaan Strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan.

3. Penganggaran adalah tahap yang domain dan proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, perbedaan tersebut karena adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran.
4. Operasional adalah pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran.
5. Evaluasi Kinerja adalah analisis berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Mulyadi (2011 : 10) menjelaskan ada enam indikator sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut : Perumusan Strategi, Perencanaan Strategi, Penyusunan Program, Penyusunan Anggaran, Pengimplementasian, Pemantauan. Berikut adalah penjelasan dari indikator :

1. Perumusan Strategi adalah Tahap perumusan strategi adalah tahap yang sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro, lingkungan industri dan lingkungan persaingan.
2. Perencanaan Strategi adalah Setelah perusahaan merumuskan strategi pilihan untuk mewujudkan visi melalui misi organisasi, misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi tersebut kemudian perlu diimplementasikan. Pengimplementasi misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi yang telah dirumuskan tersebut dilaksanakan melalui sistem perencanaan strategi. Dalam langkah ini, misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi organisasi

yang telah dirumuskan tersebut diterjemahkan kedalam company scorecard.

3. Penyusunan Program adalah Sistem penyusunan program adalah proses penyusunan laba jangka panjang untuk menjabarkan inisiatif strategik pilihan guna mewujudkan sasaran strategik. Sistem penyusunan program merupakan proses pembangunan hubungan sebab-akibat antara rencana operasional dengan rencana keuangan. Penyusunan program menghasilkan program -suatu rencana laba jangka panjang yang berisi langkah -langkah strategik pilihan untuk mewujudkan sasaran strategik tertentu beserta taksiran sumber daya yang diperlukan dan diperoleh dari bisnis.
4. Penyusunan Anggaran adalah proses penyusunan rencana laba Jangka pendek (biasanya untuk jangka waktu satu tahun atau kurang) yang berisi langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan Dalam melaksanakan sebagian dari program. Dalam penyusunan anggaran, dijabarkan program tertentu kedalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran, ditunjuk manajer dan karyawan yang bertanggung jawab, kemudian dialokasikan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
5. Pengimplementasian Dalam tahap pengimplementasian rencana ini, manajemen dan karyawan melaksanakan rencana yang tercantum dalam anggaran kedalam kegiatan nyata.

6. Pemantauan dalam Pengimplementasian rencana memerlukan pemantauan. Hasil setiap langkah yang direncanakan perlu diukur untuk memberikan umpan balik bagi pemantauan pelaksanaan anggaran, program dan inisiatif strategi.

Menurut Halim, dkk (2005 : 15) ada beberapa indikator yang dapat menyatakan bahwa proses sistem pengendalian manajemen meliputi sebagai berikut : Perencanaan Strategi, Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan, Evaluasi Kinerja. Berikut penjelasannya :

1. Perencanaan strategi adalah suatu proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi dan menaksir strategi dan menaksir sejumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang.
2. Penyusunan anggaran adalah suatu proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu ke masing-masing pusat pertanggungjawaban sehingga menunjukkan beban yang oleh masing-masing manajer diperkirakan akan terjadi serta merupakan perkiraan biaya yang akan terjadi selama satu tahun atau anggaran laba atau ROI yang diisyaratkan.
3. Pelaksanaan yaitu Selama satu tahun anggaran manajer melakukan program atau bagian dari program yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan yang dibuat hendaknya menunjukkan dapat menyediakan informasi tentang program dan pusat pertanggungjawaban. Laporan

pusat pertanggungjawaban juga harus menunjukkan informasi untuk mengukur kinerja keuangan maupun non keuangan, informasi internal maupun informasi eksternal.

4. Evaluasi Kinerja yaitu Prestasi kinerja yang bisa dilihat dari efisiensi atau efektif tidaknya suatu pusat pertanggungjawaban menjalankan tugasnya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggunaan pengukuran kinerja secara diagnostik memfokuskan peranan sistem pengendalian manajemen sebagai alat pengawasan, pengukuran pencapaian kinerja dan membandingkan kinerja tersebut dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena sistem pengendalian yang diagnostik memfokuskan pada pencapaian tujuan tertentu, jenis pengendalian ini harus memungkinkan hasil dapat diukur serta membandingkan dengan standar.

#### **2.1.4 Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.4.1 Definisi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Menurut Mahmudi (2015 : 73) mengatakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

“Suatu penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan dalam menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban yang berdampak pada pemberian penghargaan, kritik yang sifatnya membangun, kenaikan pangkat, penugasan kembali, atau pemberhentian dan pemecatan kepada manajer pusat pertanggungjawaban.”

Selanjutnya Mahsun dkk (2018 : 141) menyatakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan sebagai berikut :

“Suatu prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok, serta gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran atau tujuan organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi.”

Selanjutnya Mardiasmo (2018 : 160) Kinerja pemerintahan merupakan sebagai berikut :

“Suatu kegiatan yang tidak dapat dinilai hanya dari sisi output yang dihasilkan saja tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanannya.”

Maka dapat penulis simpulkan dari definisi diatas bahwa kinerja organisasi perangkat daerah adalah hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu yang dilakukan sekelompok orang secara bersama sesuai dengan tanggungjawab dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tidak hanya hasil tapi juga harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama.

#### **2.1.4.2 Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Menurut Kumorotomo dalam Pasolong (2011:180) beberapa indikator yang dijadikan pedoman untuk menilai kinerja publik atau kinerja organisasi perangkat daerah antara lain : Efisiensi, Efektivitas, Keadilan, Daya Tanggap. Berikut adalah penjelasan dari indikator diatas yaitu :

1. Efisiensi Menyangkut pertimbangan keberhasilan organisasi dalam pelayanan publikmendapat laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi.

2. Efektivitas Tujuan suatu organisasi tercapai atau tidak dilihat dari rasionalitas teknis, nilai misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan Indikator ini mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
4. Daya tanggap Organisasi publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018 : 157) menyatakan bahwa indikator kinerja organisasi perangkat daerah yaitu : Biaya Pelayanan, Penggunaan, Kualitas dan Standar Pelayanan, Cakupan Pelayanan, Kepuasan. Berikut adalah penjelasan dari indikator diatas yaitu :

1. Biaya Pelayanan yaitu biaya yang diukur dalam bentuk biaya unit tapi ada beberapa pelayanan yang mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan mempunyai perbedaan atau tidak adanya keseragaman tipe pelayanan yang diberikan.
2. Penggunaan yaitu membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik.
3. Kualitas dan Standar Pelayanan yaitu indikator yang harus dilakukan secara berhati-hati karena kalau terlalu menekankan justru dapat menyebabkan kontra produktif.
4. Cakupan Pelayanan yaitu sesuatu yang harus dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk

memberikan suatu pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

5. Kepuasan yaitu sesuatu yang diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung ataupun penjarangan aspirasi masyarakat dapat digunakan untuk menetapkan kepuasan bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya menurut Mahsun dkk (2018 : 149) menyatakan bahwa indikator kinerja organisasi perangkat daerah yaitu : Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran, Kualitas, Kehematan, Keadilan, Pertanggungjawaban. berikut ini penjelasan dari indikator diatas adalah :

1. Kebijakan untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian kebijakan.
2. Perencanaan dan Penganggaran untuk membantu Perencanaan dan Penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana.
3. Kualitas yaitu sesuatu proses untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan dalam suatu organisasi.
4. Kehematan untuk me-review perdistribusian dan keefektifan penggunaan sumber daya.
5. Keadilan untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat.
6. Pertanggungjawaban untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

## **2.1.5 Kecamatan**

### **2.1.5.1 Definisi Kecamatan**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1. Hubungan Good Government Governance Dengan Kecamatan

Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa :

“Akuntansi mempunyai kaitan sangat erat dengan beberapa prinsip good governance, karena Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem maupun laporan akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya pelaporan mengenai informasi akuntansi yang kurang dan tidak akurat akan terlihat bahwa kinerjanya kurang dalam partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.”

Menurut Sedarmayanti (2003) menyatakan bahwa :

“Good governance yang efektif juga menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah merupakan tantangan tersendiri.”

Otonomi daerah identik dengan bergesernya pusat-pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah, maka konsekuensi logis dari pergeseran tersebut harus dibarengi dengan meningkatnya penerapan good governance di daerah. Dalam rangka itu maka seluruh jajaran instansi pemerintah daerah, termasuk pemerintah kecamatan dituntut untuk secara sungguh-sungguh mempraktekan prinsip-prinsip good governance.

Dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008, fungsi utama pemerintah kecamatan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan

yang sangat penting dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah kecamatan harus dapat mempraktekkan prinsip-prinsip good governance.

Maka dari itu untuk mewujudkan good governance di kecamatan diperlukan peranan Camat. Dalam hal ini Camat selaku pemimpin pemerintahan di kecamatan harus mampu berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Dengan peranan yang efektif dari Camat dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tersebut diharapkan good governance dapat terwujud.

## **2. Hubungan Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Kecamatan**

Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat saat ini yaitu tuntutan untuk organisasi yang bergerak di bidang jasa seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemda maupun lembaga-lembaga negara yang dituntut dalam melaksanakan akuntabilitas publik. Tuntutan dalam pengelolaannya harus melakukan pertanggungjawaban atas menyusun, menyajikan, melaporkan dan pemberian informasi kepada publik sesuai pemenuhan hak-hak publik.”

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada

stakeholder adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya pada kecamatan yang merupakan bagian wilayah administratif dibawah kabupaten.

Upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, publikasi dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah terutama pada instansi kecamatan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam

melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah Khususnya kecamatan, oleh karena itu setiap kecamatan harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Keterbukaan merupakan data atau informasi bagi masyarakat yang dapat di akses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dapat juga menunjuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Hal ini dapat menciptakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (horizontal accountability) antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terwujud pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat.

### 3. Hubungan Sistem Pengendalian Manajemen Dengan Kecamatan

Menurut Mardiasmo (2018 : 61) menyatakan bahwa dalam akuntansi sektor publik : “ Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi yang dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi.”

Dalam suatu organisasi setiap orang memiliki tujuan personal, untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan suatu organisasi mencapai tujuannya yaitu tercapainya keselarasan antara tujuan personal dan tujuan organisasi, dalam hal ini sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya keselarasan antara tujuan organisasi dan tujuan personal.

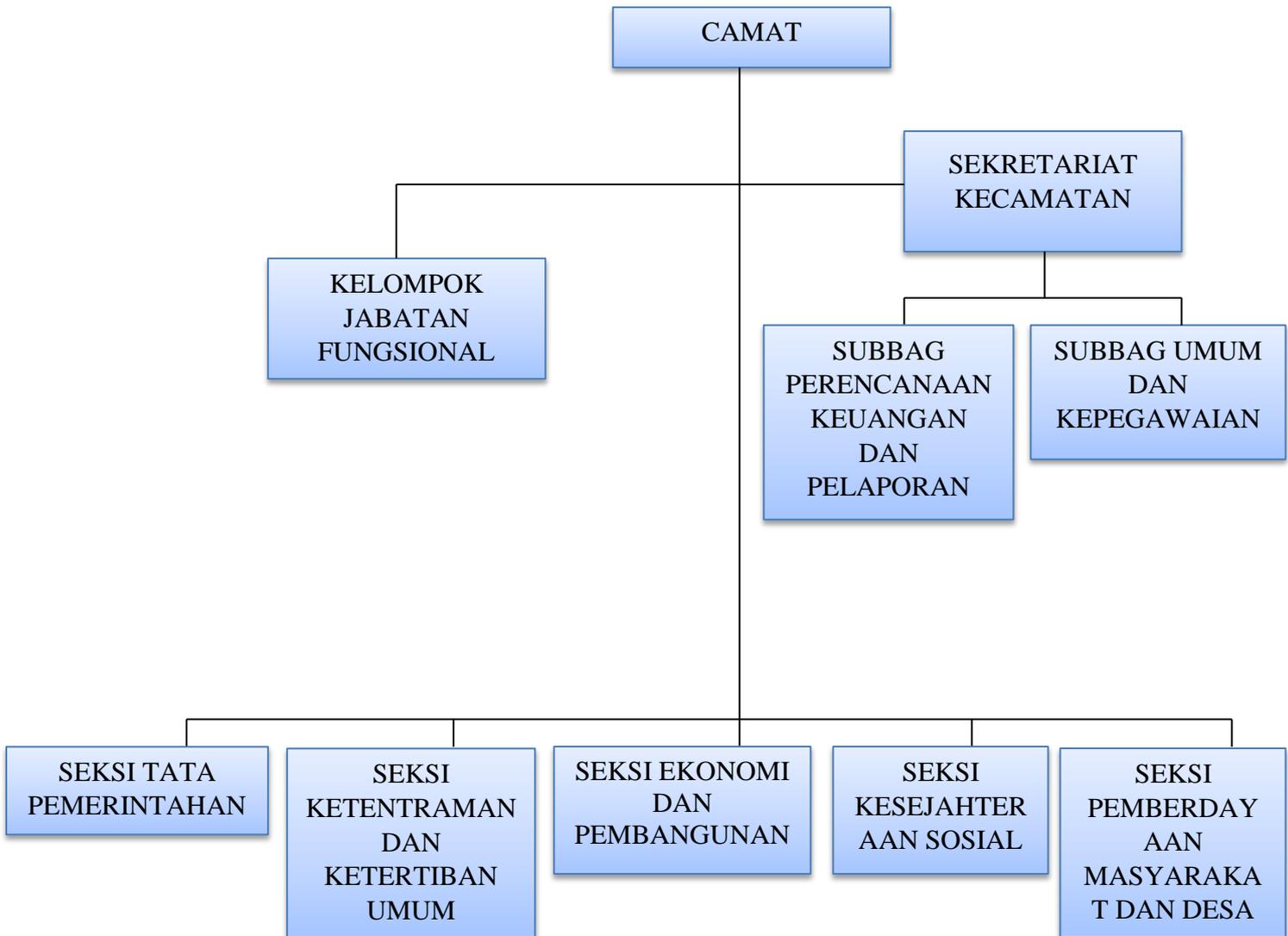
Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan faktor pengendalian in formal. Faktor pengendalian formal misalnya sistem pengendalian manajemen, sistem aturan, *reward*, dan *punishment system*. Sedangkan faktor pengendalian in formal terdiri atas faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan sedangkan faktor internal misalnya kultur organisasi, gaya manajemen, dan gaya komunikasi.

Menurut Mardiasmo (2018 : 61) menyatakan bahwa dalam akuntansi sektor publik : “ Perumusan strategi merupakan penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, kebijakan serta strategi organisasi yang merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak.”

Sistem pengendalian manajemen yang diteliti ini juga untuk memastikan bahwa visi, misi Kabupaten Purwakarta terimplementasi didalam tujuan strategi Kecamatan Babakancikao melalui pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

### 2.1.5.2 Struktur Organisasi Kecamatan

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan



Dalam Peraturan Bupati Purwakarta nomor 148 Tahun 2016 Tugas Dan Fungsinya kecamatan yaitu:

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
  - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum
  - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
  - f. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan
  - g. Pelaksanaan pelayanan publik
  - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
  - i. Pelaksanaan administrasi kecamatan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- a. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
  - c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
  - e. Rincinan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa :

“Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan suatu hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah atau bisa disebut hubungan teori dengan fakta permasalahan yang ada ”.

Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu tingkatan prestasi dan hasil kerja yang dapat dicapai oleh anggota organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dan dapat dievaluasi tingkatan dalam kinerjanya. Kinerja pemerintah daerah dapat ditentukan dengan target yang dicapai selama periode waktu yang telah ditentukan oleh organisasi.

### **2.2.1 Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Menurut pendapat (Ambarwati, 2013) menyatakan bahwa pengaruh good government governance terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

“Organisasi yang menerapkan praktek good government governance telah berupaya meminimalkan risiko keputusan yang salah atau yang menguntungkan diri sendiri, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan memajukan pemerintah kabupaten”.

Menurut Hutapea & Widyaningsih (2017) menyatakan bahwa pengaruh good government governance terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

“Pengelolaan pemerintah yang kurang baik banyak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi dimasyarakat. Jika tata kelola pemerintahnya diterapkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kinerja pemerintah yang dilakukan akan baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada pemerintah”.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2012 : 10) hubungan antara penerapan Good government governance dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa:

“Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunana dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).”

Penelitian yang dilakukan oleh Pratolo (2010) Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Good Government Governance, seperti : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh HifzaInam dan Mukthar (2014) Hasilnya bahwa tata kelola yang baik dalam suatu organisasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi tersebut. Peneliti juga menduga ada pengaruh dari good government government terhadap kinerja pada tiga unsur value for money. Dengan semakin baiknya tata kelola pada organisasi maka akan membentuk suatu kebiasaan yang membuat kinerja organisasi menjadi meningkat.

Dapat penulis simpulkan bahwa pengaruh good goverment governance terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu : Berpengaruh, karena good government governance dapat meningkatkan ataupun menurunkan kinerja pemerintahan, sehingga dapat memajukan pemerintah kabupaten Jika tata kelola pemerintahnya diterapkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan

kinerja pemerintah yang dilakukan akan baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada pemerintah.

### **2.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Menurut Saputra & Darwanis (2014) bahwa pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

“Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah dapat memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan termasuk anggaran dana yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal ini akan lebih menegaskan bahwa pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja SKPD”.

Menurut Mursyidi (2013 : 59) menyatakan bahwa pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

“Untuk mengetahui posisi akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Untuk menciptakan kinerja instansi yang baik, maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas”.

Sedangkan menurut Auditya, dkk (2013) juga menyatakan bahwa pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

“Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan program/kegiatan dan anggaran. Implementasi akuntabilitas diyakini akan mampu meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan”.

Penelitian yang dilakukan oleh (Meidawati 2012) menyimpulkan bahwa hasil pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu mempunyai pengaruh yang signifikan positif dimana

semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten maka semakin tinggi juga tingkat kinerja di Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten”.

Penelitian yang dilakukan oleh Suriani (2015) Hasil pengujian bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kabupaten.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), dan Aji (2011) Bahwa hasil penelitian mereka membuktikan bahwa prinsip akuntabilitas yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja SKPD itu sendiri.

Dapat dilihat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah adalah : Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif karena semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah maka semakin tinggi juga tingkat kinerja para pegawai di Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik.

### **2.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Menurut Rahmadi Murwanto (2012 : 195) mengungkapkan bahwa pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

“Sistem pengendalian merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi yang terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja”.

Sedangkan dalam PP No 60 Pasal 1 ayat (2) tahun 2008 menyatakan bahwa pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

“Kegiatan pengendalian intern pemerintah membantu memastikan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian intern terdiri atas review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Amelia (2014) bahwa hasil Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

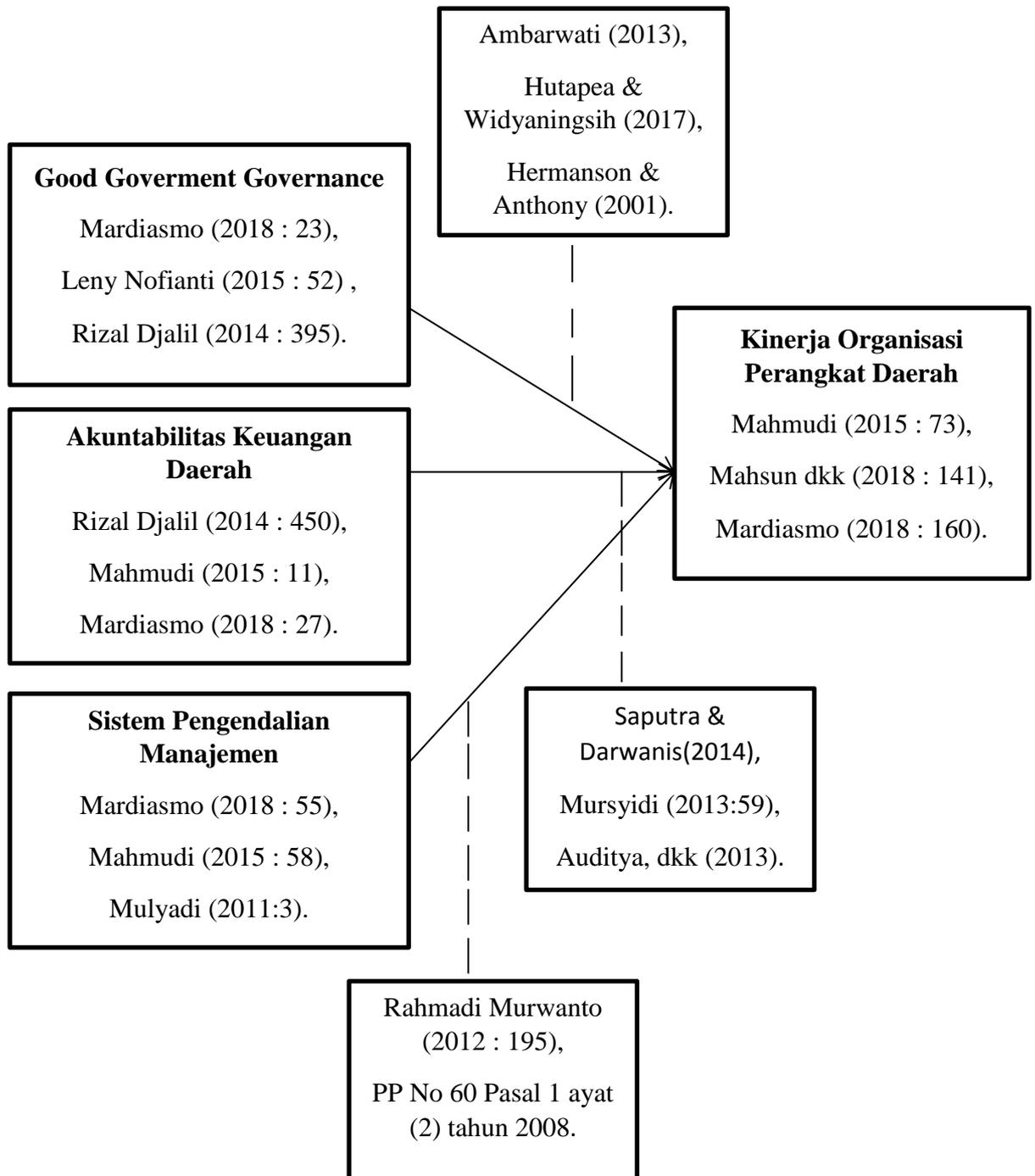
Penelitian yang dilakukan oleh Musa (2013) menyatakan bahwa pengaruh sistem pengendalian manajemen dapat meningkatkan kinerja.

Dapat dilihat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaruh pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi perangkat daerah adalah : Pengendalian Manajemen berpengaruh positif karena Pengendalian intern

merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja, Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukurannya, maka kegiatan pengendalian intern terdiri atas review kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan juga semakin baik.

Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya akan digunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Paradigma Penelitian**



### 2.3 Hipotesis Penelitian

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka dibutuhkannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis berasumsi dengan mengambil hipotesis adalah sebagai berikut :

H1 : Good Government Governance Berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi

Perangkat Daerah.

H2 : Akuntabilitas Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi

Perangkat Daerah.

H3 : Sistem Pengendalian Manajemen Berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi

Perangkat Daerah.